STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUMPULAN DATA KINERJA



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWAKARTA

I. LATAR BELAKANG

Salah satu bagian dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah pengukiran kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja dibutuhkan data kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dari indicator yang telah ditetapkan di dalam dokumen Penetapan Kinerja. Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan pengelolaan data kinerja berdasarkan pedoman pengumpulan data kinerja yang mengatur tentang substansi dan waktu agar penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat diselesaikan dengan benar dan tepat waktu.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan pedoman pengumpulan data kinerja Dinas Desa Kabupaten Pemberdayaan Masyarakat dan Purwakarta dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi unit kerja di Lingkungan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dinas Purwakartatentang mekanisme pengumpulan data kinerja. Adapun tujuannya adalah menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai gambaran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta. Data Kinerja yang dihimpun meliputi data target dan realisasi dari:

- Indikator kinerja sasaran (sebagai Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta 2024-2026 pada Cascading Renstra).
- Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (sebagai Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta 2018-2023 pada Cascading Renstra).

III.DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
 Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
 Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
 Rencana Pembangunan Daerah;

- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Permendagri Nomor 54 Thaun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan PP Nomor 08 Tahun 2008;
- e. PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
- f. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

IV. MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA PENGORGANISASIAN

a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas

Masyarakat dan Desa

b. Unit Pengelola Data : Sekretaris DPMD

c. Unit Pelayanan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kepegawaian

d. Unit Penyusun Laporan : Kasubag Perencanaan, Keuangan

Kinerja dan Pelaporan

e. Unit Penyuplai Data : - Analis Kebijakan Ahli Muda

Bidang Pemdes

- Penggerak Swadaya

Masyarakat Ahli Muda di Bidang

Pemberdayaan

Penguatan Kelembagaan dan

Potensi Desa

- Penggerak Swadaya Masayarat

di Bidang Pemberdayaan Usaha

Ekonomi Desa.

V. FORMAT PENGUMPULAN DATA KINERJA

Format Pengumpulan Data Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Tribulan	Realisasi Tribulan	Keterangan

VI.PENUTUP

Pengumpulan data kinerja harus dilaksanakan oleh semua unit kerja dilingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta sebagai suatu Prosedur operasional standar. Apabila diperlukan pedoman ini dapat direvisi untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATAN PURWAKARTA

JAYA PRANOLO, S.STP, M.Si NIP.19780306 199612 1 001

-	
WIBAWA KARTA BAHARJA	
San are	
30 01	

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWAKARTA

Kualifikasi Pelaksana

Nomor SOP

Tanggal Revisi

Disahkan Oleh

Nama SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Pengesahan

1. Menguasai Peraturan dan Perundang-undangan;

01.03/175-Sekre/2024

15 Januari 2024

15 Januari 2024

Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta

Kepala Dinas Pemberdayaan

Pengumpulan Data Kinerja

- 2. Menguasai Komputer;
- 3. Pendidikan Minimal D3/SMA

Dasar Hukum

- 1. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor25, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4614);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004Tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Pelaksanaan Evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016); 10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta;	
 Keterkaitan Foto Copy Cascading SK Tim Sakip IKU Tahun 2020 IKI Tahun 2020 Renstra Renja/RKT Tahun 2020 PK Tahun 2021 PK Individu Rencana Aksi Tahun 2021 DPA Tahun 2021 	Peralatan/Perlengkapan 1. ATK 2. Komputer/Laptop 3. Printer 4. Meja 5. Kursi 6. Filling Kabinet
Penjelasan: Bahan tersebut diperlukan sebagai Pengumpulan Data Kinerja Pegawai Negeri Sipil Peringatan 1. Apabila SOP Pengumpulan data kinerja tidak diselesaikan maka kegiatan Pelaporan akan terhambat	Pencatatan dan Pendataan Setiap tahap kegiatan terdokumentasi dengan baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy

SOP: PENGUMPULAN DATA KINERJA

		PELAKSANA			Mutu Baku				
No.	Aktivitas	Kadis	Sekretaris	Kasi/Kasubbag	staff	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output	Keterangan
1	Memerintahkan penyusunan LAKIP	0				Nota dinas	3	Dokumen	
2	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing2 bagian					Dokumen	60	Dokumen	
3	Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing2 bagian					Dokumen	60	Dokumen	
4	Menganalis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yg terkumpul					Dokumen	60	Dokumen	
5	Membuat draft Lakip				-	Dokumen	60	Dokumen	
6	Mengoreksi draft Lakip	ے کے	L			Dokumen	60	Dokumen	
7	Rapat Finalisasi Lakip			+	₩	Dokumen	60	Dokumen	
8	Menyampaikan dokumen Lakip kepada Kepala Kantor untuk persetujuan					Dokumen	60	Dokumen	
9	Penandatanganan dokumen Lakip oleh Kepala Kantor	<u> </u>				Dokumen	60	Dokumen	
10	Penandatanganan dokumen Lakip oleh Kepala Kantor					Dokumen	60	Dokumen	

11	Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran	Dokumen	60	Dokumen
12	Penggandaan Dokumen Lakip	Dokumen	60	Dokumen
13	Pengiriman dokumen Lakip	Dokumen	60	Dokumen

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWAKARTA

> JAYA PRANOLO,S.STP,M.Si NIP. 19780306 199612 1 001